

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
2018-2023**



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

DAFTAR ISI

	DAFTAR ISI	i
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU.....	1
	1.3 Landasan Hukum.....	2
BAB II	: PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA.....	4
	2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama	4
	2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	4
BAB III	: GAMBARAN UMUM.....	6
	3.1 Tugas Pokok dan Fungsi	6
	3.2 Arah Kebijakan	6
BAB IV	: PENUTUP	9
	LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawjaya disusun dengan maksud dan tujuan :

- a. Untuk memproleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan menejeman kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2456 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER /20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018- 2023;
13. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
14. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
15. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II / SKPD / Unit kerja mandiri sekurang – kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.

d. Kebutuhan statistik pemerintah.

e. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Selain tugas pokok, Bappeda menyelenggarakan fungsi diantaranya :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Kabupaten Jayawijata adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik

Sasaran :

1. Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan
2. Meningkatkan kualitas usulan musrenbang
3. Meningkatkan realisasi target-target pembangunan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Bappeda
5. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan perangkat daerah, maka variabel – variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Sasaran
4. Kebijakan
5. Strategi

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran – sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

Strategi I : Peningkatan mutu dokumen perencanaan daerah.

Arah Kebijakan :

1. Penyediaan data dan informasi sebagai basis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
2. Penyediaan dokumen perencanaan daerah
3. Penerapan e-Planing sebagai upaya mendukung mekanisme penyusunan produk Perencanaan

Strategi II : Peningkatan mutu dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan :

1. Mendorong dan memfasilitasi Perangkat Daerah dalam penyiapan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah
2. Penyediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah

Strategi III : Penerapan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan komprehensif dilakukan dengan kebijakan

Arah Kebijakan :

1. Melibatkan masyarakat dalam penyusunan Dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah

Strategi IV : Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan mutu pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
2. Peningkatan daya dukung pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Strategi V : Peningkatan kualitas perencanaan, dan evaluasi serta pelaporan Bappeda

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana dengan mengikutsertakan pegawai Bappeda pada diklat teknis, substantif dan diklat fungsional yang diselenggarakan oleh Bappenas dan diklat lainnya yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang terkait dengan perencanaan
2. Mengoptimalkan implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Strategi VI : Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan

Arah Kebijakan :

1. Efektifitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan

Strategi VII : Peningkatan kualitas pengolahan hasil-hasil penelitian dan pengembangan

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan
2. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan Non Pemerintah

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra masing – masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Jayawijaya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Bappeda.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN JAYAWIJAYA

Sasaran	Indikator	Formula	Penjelasan	Bidang Penanggungjawab
4	5	6	7	8
Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan	Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD Kategori Baik*)	Jumlah OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik $\frac{\text{Jumlah OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	Jumlah OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik dibagi Jumlah seluruh OPD dikali seratus persen	Bappeda
	Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Kategori Baik*)	Jumlah Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD $\frac{\text{Jumlah Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD}}{\text{Jumlah seluruh Renja OPD}} \times 100\%$	Jumlah Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD dibagi Jumlah seluruh Renja OPD dikali seratus	Bappeda
	Persentase tingkat Keselarasan RKPD*) terhadap RPJMD Kategori Baik	Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD kategori baik $\frac{\text{Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD kategori baik}}{\text{jumlah seluruh program RKPD}} \times 100\%$	Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD kategori baik dibagi jumlah seluruh program RKPD dikali seratus	Bappeda
Meningkatnya kualitas usulan Musrenbang	Persentase usulan Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah usulan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD $\frac{\text{Jumlah usulan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD}}{\text{Jumlah seluruh usulan musrenbang RKPD}} \times 100\%$	Jumlah usulan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah seluruh usulan musrenbang RKPD dikali seratus	Bappeda
Meningkatnya realisasi target-target pembangunan	Persentase tingkat Capaian Target Pembangunan Kategori Baik*)	Jumlah capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah kategori baik $\frac{\text{jumlah Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah}}{\text{jumlah Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah}} \times 100\%$	Jumlah capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah kategori baik dibagi jumlah Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dikali seratus	Bappeda
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Bappeda	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Bappeda	Jumlah anggaran temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada Bappeda $\frac{\text{Jumlah anggaran temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada Bappeda}}{\text{Total anggaran yang terealisasi pada Bappeda}} \times 100\%$	Jumlah anggaran temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada Bappeda dibagi Total anggaran yang terealisasi pada Bappeda dikali seratus	Bappeda
	Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda	Nilai dari hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh tim APIP kab. Jayawijaya	Nilai dari hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh tim APIP kab. Jayawijaya	Bappeda
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah data hasil penelitian yang dimanfaatkan $\frac{\text{Jumlah data hasil penelitian yang dimanfaatkan}}{\text{jumlah seluruh data hasil penelitian}} \times 100\%$	Jumlah data hasil penelitian yang dimanfaatkan dibagi jumlah seluruh data hasil penelitian dikali seratus	Bappeda

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPALA,


 PETRUS MAHUSE, AP, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 197409141996031002



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Yos Sudarso Telp. (0969) 32092 Fax. 31132 Kotak Pos 127 Wamena - Papua

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 188/ /06/2019

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2018-2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2456 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

- tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya.
Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2005-2025;
 12. Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018- 2023;
Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
 14. 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
 15. 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 2019

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**PETRUS MAHUSE,AP,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197409141996031002**

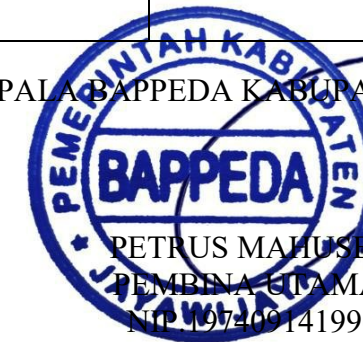
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 1 INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 2 TUGAS : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya
- 3 FUNGSI : 1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
 5. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Sasaran RPJMD yang di acu		2019	2020	2021	2022	2023		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	1 Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik*)	17,24%	34,48%	51,74%	68,97%	100%	BAPPEDA DAN SEMUA PD	BAPPEDA
			2 Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra kategori baik*)	17,24%	34,48%	51,74%	68,97%	100%	BAPPEDA DAN SEMUA PD	BAPPEDA
			3 Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD kategori baik*)	54,75%	88%	90%	92%	95%	BAPPEDA DAN SEMUA PD	BAPPEDA

2	Meningkatnya kualitas usulan musrenbang		4	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	67%	75%	80%	85%	90%	BAPPEDA DAN SEMUA PD	BAPPEDA
3	Meningkatnya realisasi target-target pembangunan		5	Persentase tingkat capaian target pembangunan kategori baik*)	75%	80%	85%	90%	95%	BAPPEDA DAN SEMUA PD	BAPPEDA
4	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Bappeda		6	Persentase anggaran yang menjadi temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada Bappeda	0,50%	0,50%	0,40%	0,30%	0,20%	BAPPEDA DAN SEMUA PD	BAPPEDA
			7	Predikat evaluasi SAKIP Bappeda	65 (CC)	70 (BB)	80 (BB)	83 (BB)	85(BB)	BAPPEDA	BAPPEDA
5	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan		8	Persentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah	40%	50%	60%	65%	80%	BAPPEDA DAN SEMUA PD	BAPPEDA

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JAYAWIJAYA



PETRUS MAHUSELAP, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 197409141996031002